

Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Meningkatkan Kinerja UMKM di Kabupaten Pinrang

Rachmatul Hidayat¹, Rahmat Rahim², Pidiya Alirman³, Citra Ayu Ningsih⁴, Bahrudin⁵
¹²³⁴⁵Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Parepare

Corresponding Author: hidayatdaya1@gmail.com

Published: Januari, 2026

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) constitute a vital pillar of regional economic development by contributing to employment creation, income distribution, and local economic resilience. In Pinrang Regency, MSMEs play a strategic role in supporting community livelihoods; however, their growth potential is often constrained by limited access to formal financing. To address this issue, the Government of Indonesia introduced the People's Business Credit (Kredit Usaha Rakyat/KUR) program as a policy instrument aimed at expanding affordable and inclusive financing for MSMEs through interest subsidies and simplified credit schemes. This study aims to analyze the role of the KUR program in improving the performance of MSMEs in Pinrang Regency. The research employs a descriptive qualitative approach, utilizing secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS), Bank Indonesia (BI), the Financial Services Authority (OJK), and relevant prior studies. The findings indicate that KUR has a positive impact on MSME development, particularly in enhancing access to working capital, increasing production capacity, and improving business revenues. MSMEs receiving KUR financing show greater flexibility in business expansion and improved resilience in facing economic challenges. Nevertheless, the effectiveness of the KUR program is not yet optimal. Several obstacles persist, including low levels of financial literacy among MSME actors, limited business assistance and mentoring, and insufficient digital readiness to adapt to technological and market changes. These challenges reduce the overall impact of credit utilization on long-term business sustainability. Therefore, stronger policy synergy is required between local governments, financial institutions, and related stakeholders to complement KUR financing with capacity-building programs, financial education, and digital transformation initiatives. Such integrated efforts are essential to maximize the role of KUR in driving sustainable regional economic growth in Pinrang Regency.

Keywords: People's Business Credit, MSMEs, business performance, financing, Pinrang Regency.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari peran strategis sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM berfungsi sebagai tulang punggung perekonomian karena kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja, mendistribusikan pendapatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Di Indonesia, UMKM berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional, sehingga menjadi penopang utama ketahanan ekonomi, terutama pada saat terjadi krisis (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Dominasi UMKM ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang tidak berpihak pada penguatan UMKM berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi dan melemahkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

Berdasarkan laporan terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024), penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus mengalami peningkatan dan menjadi salah satu instrumen utama dalam memperluas inklusi keuangan bagi UMKM. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyediakan pembiayaan yang terjangkau melalui skema subsidi bunga dan kemudahan persyaratan kredit. Namun demikian, meskipun secara nasional penyaluran KUR menunjukkan tren positif,

efektivitas implementasinya di tingkat daerah masih menunjukkan variasi yang signifikan, bergantung pada karakteristik ekonomi lokal, kapasitas lembaga penyalur, serta kesiapan pelaku UMKM itu sendiri.

UMKM di Kabupaten Pinrang berkembang pada berbagai sektor ekonomi, seperti perdagangan, pertanian, pengolahan hasil pertanian, dan jasa. Struktur ekonomi yang masih didominasi oleh sektor primer dan usaha skala kecil menyebabkan UMKM di daerah ini memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap permodalan untuk meningkatkan nilai tambah produk. Meskipun jumlah UMKM terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sebagian besar pelaku usaha masih menghadapi kendala struktural, khususnya keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal. Rendahnya akses modal tersebut berdampak pada keterbatasan UMKM dalam meningkatkan skala usaha, produktivitas, inovasi, serta daya saing di pasar yang semakin kompetitif.

Keterbatasan akses pembiayaan UMKM dapat dijelaskan melalui teori *credit rationing* yang dikemukakan oleh Stiglitz dan Weiss (1981), yang menyatakan bahwa adanya asimetri informasi antara pelaku usaha dan lembaga keuangan mendorong perbankan untuk membatasi penyaluran kredit, meskipun usaha tersebut layak secara ekonomi. Dalam konteks UMKM, keterbatasan laporan keuangan, agunan, dan rekam jejak usaha menjadi faktor utama yang menghambat akses kredit. Untuk merespons permasalahan tersebut, pemerintah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai instrumen pembiayaan bersubsidi yang ditujukan bagi UMKM yang layak usaha namun belum sepenuhnya memenuhi persyaratan perbankan konvensional.

Meskipun kajian mengenai KUR telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menitikberatkan pada analisis kuantitatif di tingkat nasional atau provinsi, dengan fokus pada hubungan statistik antara penyaluran kredit dan kinerja UMKM, seperti omzet, pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja. Kajian yang secara khusus menelaah peran KUR dalam konteks ekonomi daerah, terutama pada wilayah kabupaten dengan karakteristik ekonomi berbasis pertanian dan perdagangan seperti Kabupaten Pinrang, masih relatif terbatas. Padahal, konteks lokal sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pembiayaan UMKM.

Selain itu, sebagian penelitian masih berfokus pada dampak finansial KUR, sementara aspek non-finansial seperti literasi keuangan, pendampingan usaha, serta kesiapan digital UMKM belum banyak dikaji secara komprehensif. Padahal, tanpa dukungan pendampingan dan peningkatan kapasitas usaha, pemanfaatan KUR berpotensi tidak optimal dan bahkan dapat menimbulkan risiko kredit bermasalah. Oleh karena itu, artikel ini berupaya mengisi celah penelitian tersebut dengan menganalisis peran KUR terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Pinrang secara deskriptif dan kontekstual. Hasil kajian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan literatur UMKM, tetapi juga menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih efektif dan terintegrasi dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

a. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pembiayaan pemerintah yang bertujuan meningkatkan akses permodalan UMKM melalui subsidi bunga dan penjaminan kredit. Program ini dirancang untuk mengatasi kegagalan pasar dalam penyaluran kredit kepada usaha kecil yang menghadapi keterbatasan agunan dan informasi keuangan (Kementerian Keuangan, 2022).

Dalam perspektif teori intermediasi keuangan, KUR berperan sebagai instrumen kebijakan untuk mendorong alokasi kredit ke sektor produktif yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian, tetapi kurang terlayani oleh perbankan (Beck & Demirgüç-Kunt, 2006). Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa KUR berdampak positif terhadap peningkatan omzet, pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja UMKM (Sari & Nugroho, 2021; Putra et al., 2023). KUR juga berperan dalam mendorong inklusi keuangan dan memperluas akses UMKM terhadap lembaga keuangan formal.

Meskipun demikian, efektivitas KUR tidak hanya ditentukan oleh besarnya kredit yang disalurkan, tetapi juga oleh ketepatan sasaran, pemanfaatan kredit, serta kemampuan manajerial pelaku UMKM. Oleh karena itu, analisis terhadap peran KUR perlu mempertimbangkan konteks

lokal serta karakteristik UMKM penerima kredit agar dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dampaknya terhadap kinerja usaha.

b. Kinerja UMKM

Kinerja UMKM mencerminkan kemampuan usaha dalam mengelola sumber daya secara efektif dan berkelanjutan. Indikator kinerja UMKM meliputi peningkatan omzet, keuntungan usaha, kapasitas produksi, jumlah tenaga kerja, serta keberlanjutan usaha (Munizu, 2019). Berbagai studi empiris menunjukkan adanya hubungan positif antara akses pembiayaan dan kinerja UMKM. Penelitian oleh Rahman dan Yuliana (2022) menemukan bahwa UMKM yang memperoleh akses kredit formal cenderung memiliki pertumbuhan omzet dan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan UMKM yang tidak memperoleh pembiayaan. Selain itu, dukungan pembiayaan juga berkontribusi terhadap keberlanjutan usaha melalui peningkatan kemampuan UMKM dalam menghadapi risiko usaha dan fluktuasi permintaan pasar.

Dengan demikian, program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi instrumen strategis dalam mendukung peningkatan kinerja UMKM. Evaluasi terhadap kinerja UMKM penerima KUR menjadi penting untuk menilai sejauh mana program tersebut mampu mencapai tujuan kebijakan, khususnya dalam mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan memperkuat perekonomian daerah

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam mendukung kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pinrang. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena kebijakan pembiayaan UMKM secara mendalam dan kontekstual sesuai dengan kondisi ekonomi daerah.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan analisis data sekunder. Data diperoleh dari berbagai sumber resmi dan kredibel, antara lain publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pinrang, laporan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta dokumen kebijakan dan laporan terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan artikel jurnal ilmiah, buku teks, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk memperkuat landasan teoritis dan empiris penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengacu pada model analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014), yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilah dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi analitis dan tabel pendukung untuk memudahkan pemahaman terhadap pola dan temuan yang muncul. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang dilakukan dengan menginterpretasikan data secara sistematis guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai peran KUR terhadap UMKM.

Fokus analisis diarahkan pada peran KUR dalam meningkatkan akses permodalan, kinerja usaha, dan keberlanjutan UMKM di Kabupaten Pinrang. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai tantangan implementasi KUR di tingkat daerah, seperti keterbatasan literasi keuangan, pendampingan usaha, serta kesiapan digital pelaku UMKM. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran empiris yang relevan serta rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung optimalisasi peran KUR dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap data sekunder dan studi literatur, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan utama terkait peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Pinrang.

Pertama, program KUR terbukti berperan signifikan dalam meningkatkan akses permodalan UMKM, khususnya bagi usaha mikro dan kecil yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal. Skema pembiayaan dengan subsidi bunga serta persyaratan yang relatif fleksibel memungkinkan UMKM memperoleh modal kerja yang lebih terjangkau dan berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa KUR efektif dalam menjembatani kesenjangan pembiayaan yang disebabkan oleh keterbatasan agunan dan asimetri informasi antara pelaku UMKM dan lembaga keuangan.

Kedua, peningkatan akses permodalan melalui KUR berdampak positif terhadap kinerja UMKM. UMKM penerima KUR menunjukkan peningkatan kapasitas produksi, pendapatan usaha, serta ketahanan dalam menghadapi tekanan ekonomi. Akses terhadap pembiayaan formal memungkinkan UMKM melakukan investasi produktif dan memperbaiki pengelolaan usaha, sehingga mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka menengah dan panjang.

Ketiga, penelitian ini menemukan bahwa implementasi KUR di Kabupaten Pinrang masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Rendahnya tingkat literasi keuangan pelaku UMKM menjadi kendala utama dalam optimalisasi pemanfaatan dana KUR. Selain itu, keterbatasan pendampingan usaha dan rendahnya kesiapan digital UMKM turut membatasi dampak KUR terhadap peningkatan kinerja usaha secara menyeluruh. Temuan ini menunjukkan bahwa pembiayaan saja belum cukup untuk mendorong transformasi UMKM tanpa didukung oleh penguatan kapasitas non-finansial.

Keempat, secara makro, KUR memiliki implikasi positif terhadap pembangunan ekonomi daerah. Penguatan UMKM melalui peningkatan akses permodalan berkontribusi terhadap penguatan aktivitas ekonomi lokal, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja. Namun, dampak tersebut masih berpotensi ditingkatkan melalui integrasi kebijakan pembiayaan dengan strategi pengembangan UMKM yang lebih komprehensif.

Temuan penelitian ini mengonfirmasi relevansi teori *credit rationing* yang dikemukakan oleh Stiglitz dan Weiss (1981), yang menjelaskan bahwa keterbatasan akses pembiayaan UMKM disebabkan oleh asimetri informasi antara pelaku usaha dan lembaga keuangan. Program KUR berfungsi sebagai instrumen kebijakan publik yang mampu mengurangi dampak asimetri informasi tersebut melalui subsidi bunga dan skema penjaminan, sehingga memperluas akses kredit bagi UMKM yang layak usaha namun belum memenuhi kriteria perbankan konvensional.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan konsep inklusi keuangan yang menekankan pentingnya akses terhadap layanan keuangan formal sebagai prasyarat pembangunan ekonomi yang inklusif (World Bank, 2022). Dalam konteks Kabupaten Pinrang, KUR tidak hanya berperan sebagai sumber pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana integrasi UMKM ke dalam sistem keuangan formal, yang berimplikasi pada peningkatan stabilitas dan keberlanjutan usaha.

Dampak positif KUR terhadap kinerja UMKM yang ditemukan dalam penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu, seperti Putra et al. (2023), yang menunjukkan bahwa pembiayaan KUR berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan ketahanan usaha UMKM. Namun demikian, penelitian ini memperluas diskusi dengan menekankan bahwa besarnya dampak KUR sangat dipengaruhi oleh kapasitas internal UMKM, khususnya dalam hal literasi keuangan dan kemampuan manajerial.

Diskusi juga menunjukkan bahwa tantangan implementasi KUR di tingkat daerah mencerminkan keterbatasan pendekatan kebijakan yang masih berfokus pada aspek pembiayaan. Rendahnya literasi keuangan, minimnya pendampingan usaha, serta keterbatasan kesiapan digital UMKM menjadi faktor yang membatasi optimalisasi manfaat KUR. Hal ini sejalan dengan pandangan OECD (2021) yang menekankan bahwa penguatan UMKM di era ekonomi digital memerlukan pendekatan terpadu yang mengombinasikan pembiayaan dengan pengembangan kapasitas dan transformasi digital.

Dari perspektif pembangunan ekonomi daerah, temuan penelitian ini memperkuat teori *local economic development* yang menempatkan UMKM sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi berbasis

lokal. KUR berpotensi menciptakan efek pengganda melalui peningkatan pendapatan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, agar dampak tersebut bersifat berkelanjutan, KUR perlu diposisikan sebagai bagian dari kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang terintegrasi, bukan sekadar instrumen kredit.

Secara keseluruhan, temuan dan diskusi dalam penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan program KUR tidak hanya ditentukan oleh besaran penyaluran kredit, tetapi juga oleh kualitas pemanfaatan dan dukungan kebijakan pendamping. Integrasi antara pembiayaan, peningkatan kapasitas UMKM, dan penguatan ekosistem usaha menjadi kunci dalam memaksimalkan peran KUR terhadap pengembangan UMKM dan pembangunan ekonomi daerah.

Pembahasan

1 Peran KUR terhadap Akses Permodalan UMKM

Hasil analisis menunjukkan bahwa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pinrang. Program ini secara khusus menyasar kelompok usaha mikro dan kecil yang selama ini mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan formal akibat keterbatasan agunan, rendahnya kelayakan administratif, serta minimnya rekam jejak keuangan. Melalui skema pembiayaan bersubsidi dengan tingkat suku bunga yang relatif rendah serta persyaratan yang lebih fleksibel dibandingkan kredit komersial, KUR memberikan peluang yang lebih luas bagi UMKM untuk memperoleh tambahan modal kerja secara berkelanjutan.

Dalam konteks Kabupaten Pinrang, keberadaan KUR menjadi solusi atas permasalahan struktural pembiayaan UMKM. Sebelum adanya KUR, sebagian besar pelaku UMKM mengandalkan sumber pembiayaan informal, seperti pinjaman keluarga, koperasi nonformal, atau bahkan rentenir, yang umumnya memiliki tingkat bunga tinggi dan berisiko terhadap keberlangsungan usaha. Dengan hadirnya KUR, UMKM memiliki alternatif pembiayaan yang lebih aman, terjangkau, dan terintegrasi dengan sistem keuangan formal. Hal ini secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan di tingkat daerah.

Temuan ini sejalan dengan konsep inklusi keuangan yang menekankan pentingnya akses yang adil dan terjangkau terhadap layanan keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok usaha skala kecil, sebagai prasyarat utama bagi pembangunan ekonomi yang inklusif (World Bank, 2022). KUR berperan sebagai instrumen kebijakan yang mampu menjembatani kesenjangan akses pembiayaan antara UMKM dan lembaga keuangan formal. Dengan demikian, KUR tidak hanya meningkatkan kuantitas pembiayaan yang diterima UMKM, tetapi juga memperbaiki kualitas struktur pembiayaan usaha secara lebih berkelanjutan.

Selain itu, peningkatan akses permodalan melalui KUR memberikan ruang bagi UMKM untuk melakukan perencanaan usaha yang lebih baik. Modal kerja yang memadai memungkinkan pelaku usaha untuk membeli bahan baku dalam jumlah lebih besar, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperbaiki kualitas produk. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi meningkatkan daya saing UMKM di pasar lokal maupun regional. Oleh karena itu, peran KUR dalam meningkatkan akses permodalan tidak dapat dipisahkan dari upaya penguatan fondasi usaha UMKM di Kabupaten Pinrang.

2 Dampak KUR terhadap Kinerja UMKM

Akses terhadap pembiayaan KUR terbukti memberikan dampak positif terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Pinrang, baik dari sisi kapasitas produksi, pendapatan usaha, maupun keberlanjutan usaha. UMKM yang memperoleh KUR cenderung menunjukkan peningkatan kemampuan dalam menjalankan aktivitas usaha secara lebih stabil dan terencana. Tambahan modal kerja memungkinkan pelaku usaha untuk mengoptimalkan proses produksi, memperluas variasi produk, serta meningkatkan volume penjualan.

Peningkatan kinerja ini juga tercermin dari kemampuan UMKM penerima KUR dalam menghadapi tekanan ekonomi, baik yang bersifat musiman maupun struktural. UMKM yang memiliki akses terhadap pembiayaan formal relatif lebih tangguh dalam menjaga kelangsungan usaha dibandingkan UMKM yang tidak memiliki akses kredit. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Putra et al. (2023) yang menyatakan bahwa pembiayaan KUR berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan usaha UMKM, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Lebih lanjut, dampak KUR terhadap kinerja UMKM tidak hanya bersifat jangka pendek. Akses pembiayaan yang berkelanjutan memungkinkan UMKM untuk melakukan investasi produktif, seperti pembelian peralatan usaha, perbaikan sarana produksi, dan pengembangan kapasitas tenaga kerja. Investasi ini berperan penting dalam meningkatkan efisiensi usaha dan memperkuat posisi UMKM dalam rantai nilai ekonomi lokal. Dengan demikian, KUR berkontribusi terhadap peningkatan kinerja usaha dalam jangka menengah dan panjang.

Namun demikian, tingkat dampak KUR terhadap kinerja UMKM tidak bersifat seragam. Perbedaan karakteristik usaha, tingkat pendidikan pelaku UMKM, serta kemampuan manajerial memengaruhi sejauh mana pembiayaan KUR dapat dimanfaatkan secara optimal. UMKM yang memiliki perencanaan usaha dan pengelolaan keuangan yang lebih baik cenderung memperoleh manfaat yang lebih besar dari KUR. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan perlu didukung oleh peningkatan kapasitas non-finansial agar dampaknya terhadap kinerja usaha dapat lebih maksimal.

3 Tantangan Implementasi KUR di Kabupaten Pinrang

Meskipun program KUR memberikan manfaat yang signifikan bagi UMKM, hasil analisis menunjukkan bahwa implementasinya di Kabupaten Pinrang masih menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi menghambat optimalisasi pemanfaatannya. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha yang belum memiliki pemahaman memadai mengenai pengelolaan kredit, pencatatan keuangan, serta perencanaan arus kas usaha. Kondisi ini menyebabkan pemanfaatan dana KUR belum sepenuhnya diarahkan untuk kegiatan produktif yang mampu meningkatkan kinerja usaha secara berkelanjutan.

Rendahnya literasi keuangan juga berdampak pada meningkatnya risiko penggunaan dana KUR untuk kebutuhan konsumtif atau jangka pendek, sehingga manfaat pembiayaan tidak optimal. Dalam beberapa kasus, keterbatasan pemahaman ini dapat meningkatkan risiko kredit bermasalah, yang pada akhirnya merugikan baik pelaku UMKM maupun lembaga penyalur kredit. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan menjadi faktor kunci dalam memastikan efektivitas program KUR di tingkat daerah.

Selain literasi keuangan, keterbatasan pendampingan usaha juga menjadi tantangan penting. Pendampingan yang masih bersifat terbatas menyebabkan UMKM kurang mendapatkan arahan strategis dalam memanfaatkan pembiayaan KUR untuk pengembangan usaha. Tanpa pendampingan yang memadai, UMKM cenderung berfokus pada pemenuhan kebutuhan operasional jangka pendek, sehingga kurang mendorong transformasi usaha ke arah yang lebih produktif, inovatif, dan berdaya saing.

Tantangan lainnya adalah rendahnya kesiapan digital UMKM di Kabupaten Pinrang. Sebagian besar pelaku UMKM masih belum optimal dalam memanfaatkan teknologi digital, baik dalam aspek pengelolaan keuangan, akses layanan keuangan digital, maupun pemasaran produk secara daring. Padahal, di era ekonomi digital, pemanfaatan teknologi menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi usaha dan memperluas akses pasar (OECD, 2021). Keterbatasan kesiapan digital ini berpotensi membatasi dampak KUR terhadap peningkatan kinerja UMKM secara menyeluruh.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan program KUR tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pembiayaan, tetapi juga sangat bergantung pada dukungan kebijakan komplementer. Sinergi antara pembiayaan, peningkatan literasi keuangan, pendampingan usaha, serta penguatan kapasitas digital UMKM menjadi prasyarat penting dalam memaksimalkan manfaat KUR di tingkat daerah.

4 Implikasi KUR terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah

Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap UMKM tidak hanya berdampak pada peningkatan kinerja usaha secara individual, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap pembangunan ekonomi daerah. Peningkatan akses permodalan UMKM mendorong penguatan aktivitas ekonomi lokal melalui peningkatan produksi, distribusi barang dan jasa, serta penciptaan lapangan kerja. Dalam konteks Kabupaten Pinrang, implikasi ini menjadi sangat relevan mengingat struktur perekonomian daerah yang masih didominasi oleh UMKM berbasis pertanian, perdagangan, dan jasa.

Penguatan UMKM melalui KUR berpotensi menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian daerah. Peningkatan pendapatan pelaku UMKM mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa lokal. Aktivitas ekonomi yang meningkat ini dapat memperkuat basis ekonomi daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekonomi tertentu. Kondisi tersebut sejalan dengan teori pembangunan ekonomi daerah yang menekankan peran usaha kecil dan menengah sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi berbasis lokal (*local economic development*).

Namun demikian, agar KUR dapat memberikan dampak yang optimal terhadap pembangunan ekonomi daerah, diperlukan integrasi yang lebih kuat antara kebijakan pembiayaan dan strategi pengembangan UMKM. Tanpa dukungan peningkatan kapasitas usaha, perluasan akses pasar, serta percepatan transformasi digital, dampak KUR berisiko bersifat jangka pendek dan kurang berkelanjutan. Oleh karena itu, KUR perlu diposisikan tidak hanya sebagai instrumen kredit, tetapi sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang komprehensif.

Dengan pendekatan yang terintegrasi, KUR dapat menjadi katalisator penguatan UMKM sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam memastikan bahwa manfaat KUR dapat dirasakan secara optimal oleh UMKM dan masyarakat Kabupaten Pinrang secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki peran strategis dalam meningkatkan kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pinrang. KUR terbukti efektif dalam memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM, khususnya usaha mikro dan kecil yang sebelumnya mengalami keterbatasan dalam mengakses pembiayaan formal. Peningkatan akses permodalan tersebut memberikan dampak positif terhadap penguatan modal kerja, peningkatan kapasitas produksi, serta pertumbuhan pendapatan dan keberlanjutan usaha UMKM.

Meskipun demikian, efektivitas implementasi KUR di Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya optimal. Berbagai tantangan masih dihadapi, terutama rendahnya tingkat literasi keuangan pelaku UMKM, keterbatasan pendampingan usaha yang berkelanjutan, serta kesiapan digital UMKM yang masih relatif rendah. Kondisi ini menyebabkan pemanfaatan KUR cenderung berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek dan belum sepenuhnya mendorong transformasi usaha yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Oleh karena itu, keberhasilan program KUR tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pembiayaan, tetapi juga sangat bergantung pada dukungan kebijakan komplementer yang mampu meningkatkan kapasitas manajerial, literasi keuangan, dan kemampuan adaptasi UMKM terhadap dinamika lingkungan usaha.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penggunaan data sekunder dengan pendekatan deskriptif kualitatif membatasi kemampuan penelitian dalam mengukur besaran pengaruh KUR terhadap kinerja UMKM secara kuantitatif. Kedua, fokus penelitian yang terbatas pada Kabupaten Pinrang menyebabkan hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan ke daerah lain dengan karakteristik ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran

(*mixed methods*) serta memperluas cakupan wilayah penelitian guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan memperkuat validitas temuan.

REFERENSI

Beck, T., & Demirgüç-Kunt, A. (2006). *Small and medium-size enterprises: Access to finance as a growth constraint*. *Journal of Banking & Finance*, 30(11), 2931–2943. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2006.05.009>

Badan Pusat Statistik. (2023). *Kabupaten Pinrang dalam angka 2023*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)*. Kementerian Keuangan RI.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023). *Perkembangan data usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tahun 2023*. Kemenkop UKM RI.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

Munizu, M. (2019). Pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap kinerja usaha mikro dan kecil (UMK). *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 21(1), 1–10.

OECD. (2021). *The digital transformation of SMEs*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/bdb9256a-en>

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Laporan perkembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)*. OJK Republik Indonesia.

Putra, R. A., Hidayat, M., & Lestari, E. (2023). Dampak Kredit Usaha Rakyat terhadap kinerja UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(2), 145–160.

Rahman, A., & Yuliana, S. (2022). Akses pembiayaan dan kinerja usaha mikro kecil di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(1), 65–78.

Sari, D. P., & Nugroho, A. (2021). Peran Kredit Usaha Rakyat dalam meningkatkan kinerja UMKM. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 25(3), 412–425.

Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect information. *The American Economic Review*, 71(3), 393–410.

World Bank. (2022). *Financial inclusion overview*. World Bank Group.